

**DESENTRALISASI FISKAL DAN
KETIMPANGAN REGIONAL DI INDONESIA
TAHUN 2004 – 2013**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun oleh:

**RIFI FAZRINA DJUUNA
NIM. 12020111130042**

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2016**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Rifi Fazrina Djuuna
Nomor Induk Mahasiswa : 12020111130042
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/ IESP
Judul Skripsi : DESENTRALISASI FISKAL DAN
KETIMPANGAN REGIONAL DI INDONESIA
TAHUN 2004 – 2013
Dosen Pembimbing : Wahyu Widodo, S.E., M.Si., Ph.D

Semarang, 21 Desember 2016

Dosen Pembimbing,

(Wahyu Widodo, S.E., M.Si., Ph.D)

NIP. 197310182002121001

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Rifi Fazrina Djuuna
Nomor Induk Mahasiswa : 12020111130042
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/ IESP
Judul Skripsi : DESENTRALISASI FISKAL DAN
KETIMPANGAN REGIONAL DI INDONESIA
TAHUN 2004 – 2013

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 30 Desember 2016

Tim Penguji

1. Wahyu Widodo, S.E., M.Si., Ph.D (.....)
2. Prof. Dr. FX Sugiyanto, MS (.....)
3. Akhmad Syakir Kurnia, S.E., M.Si., Ph.D (.....)

Mengetahui,

Pembantu Dekan I

Anis Chairi, S.E., M.Com., Ph.D. Akt.
NIP. 196708091992031001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini saya, Rifi Fazrina Djuuna, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: “Desentralisasi Fiskal dan Ketimpangan Regional di Indonesia Tahun 2004 – 2013”, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagian tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti ijazah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 21 Desember 2016

Yang membuat pernyataan,

(Rifi Fazrina Djuuna)

NIM: 12020111130042

ABSTRAK

Sistem desentralisasi fiskal dilaksanakan di Indonesia sebagai solusi atas permasalahan ketimpangan regional dan adanya ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Namun, sejak desentralisasi fiskal dilaksanakan di Indonesia, tingkat ketimpangan regional secara nasional cenderung mengalami peningkatan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis derajat desentralisasi fiskal dan tingkat ketimpangan regional di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga secara spesifik bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan desentralisasi fiskal dan pengaruhnya terhadap tingkat ketimpangan regional di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan alat analisis EFDI Vo(2008) untuk mengukur derajat desentralisasi fiskal, analisis indeks Williamson untuk mengukur tingkat ketimpangan regional, dan menggunakan metode Arrelano Bond *Generalized Method of Moments* (GMM) yaitu *Two-Step System GMM* untuk menggambarkan pengaruh dari derajat desentralisasi fiskal terhadap tingkat ketimpangan regional. Metode tersebut digunakan untuk menggambarkan hubungan dinamis dari variabel tingkat ketimpangan regional. Objek penelitian ini adalah 32 provinsi di Indonesia tahun 2004 – 2013.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa derajat desentralisasi fiskal di Indonesia cenderung rendah. Tingkat ketimpangan regional cenderung stabil dalam periode 2004 – 2013, namun tingkat ketimpangan regional cenderung sangat tinggi untuk daerah yang kaya akan sumber daya. Hasil analisis data panel dinamis menunjukkan bahwa variabel tingkat ketimpangan regional tahun sebelumnya, variabel derajat desentralisasi fiskal, dan variabel pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat ketimpangan regional. Variabel pengeluaran rumah tangga per kapita dan variabel peran pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan, sedangkan variabel kesehatan tidak berpengaruh signifikan pada tingkat ketimpangan regional.

Kata kunci: Desentralisasi fiskal, ketimpangan regional, *Two-Step System GMM*

ABSTRACT

Indonesia has implemented fiscal decentralization system as a solution for the problems of regional inequality and high dependency level of local government to central government. But, data stated regional inequality tends to increase after the implementation of fiscal decentralization. Therefore, this study aims to analyze the degree of fiscal decentralization and regional inequality in Indonesia. Specifically, this study objects to evaluate the implementation of fiscal decentralization and examine the impact of fiscal decentralization to regional inequality in Indonesia.

This study use fiscal decentralization indices developed by Vo(2008) to measure the degree of fiscal decentralization, Williamson index to measure the degree of regional inequality, and dynamic panel data analysis with Arrelano Bond Generalized Method of Moments (GMM), which is Two-Step System GMM to show the impact of the fiscal decentralization indices to regional inequality. The object of this study is 32 provinces in Indonesia 2004 – 2013.

The results showed that the degree of fiscal decentralization in Indonesia is relatively low. Regional inequality is relatively stable in 2004 – 2013, but the degree of regional inequality is exceptionally high in rich provinces. Dynamic panel data analysis showed that lagged regional inequality variable, degree of fiscal decentralization, and education has positive and significant relationship to regional inequality. Per capita household expenditure variable and role of government has negative and significant relationship to regional inequality, meanwhile health has no significant effect to regional inequality.

Keywords: Fiscal decentralization, regional inequality, Two-Step System GMM

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat, hidayah, dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Desentralisasi Fiskal dan Ketimpangan Regional di Indonesia Tahun 2004 – 2013”. Tujuan penulisan skripsi ini untuk memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada program Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Diponegoro. Selesaiannya skripsi ini tidak terlepas dari doa, bantuan, bimbingan, serta dukungan berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Suharnomo, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
2. Bapak Akhmad Syakir Kurnia, S.E., M.Si., Ph. D. selaku ketua jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
3. Bapak Wahyu Widodo, S.E., M.Si., Ph. D. selaku dosen pembimbing, yang telah meluangkan waktu dan perhatian ditengah kesibukan untuk memberikan bimbingan, pengarahan, saran dan motivasi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
4. Ibu Banatul Hayati, S.E., M.Si selaku dosen wali penulis yang telah memberikan pengarahan dan motivasi selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
5. Kedua orang tua, Henry F. Djuuna dan Asna Rahim, serta kakak Rifa Nurrisqi Djuuna dan Marion Renaldo Rotinsulu yang telah mendoakan,

memberi motivasi, dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Universitas Diponegoro.

6. Ade Pramudhito, atas motivasi dan semangat yang diberikan bagi penulis untuk menyelesaikan masa studi di Universitas Diponegoro.
7. Kontingen Garuda42 dan seluruh *Participating Youth* SSEAYP 2015 atas pengalaman berharga yang diperoleh penulis, khususnya untuk Kiki Riski Kemala Ayu, Kana Oshiba, dan Winnie Hoe.
8. Nur Fahmi Rofiq dan Afief E.A., teman terbaik penulis selama menyelesaikan studi dan berorganisasi. Penulis bersyukur punya teman terbaik seperti mereka, yang memberi banyak hiburan, pelajaran, serta nasihat.
9. Rizki Kharina dan Kinanti Widiari Lestari, kedua kakak yang senantiasa menghibur penulis semasa penyusunan skripsi ini.
10. IESP 2011 yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu atas waktu diskusi dan pengalaman masa kuliah yang berharga.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersiat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Semarang, 21 Desember 2016

Rifi Fazrina Djuuna

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
DAFTAR ISTILAH	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
1.4 Sistematika Penelitian	8
BAB II TELAAH PUSTAKA	10
2.1 Landasan Teori.....	10
2.1.1 Desentralisasi Fiskal	10
2.1.2 Desentralisasi Fiskal di Indonesia	14
2.1.3 <i>Intergovernmental Transfer</i>	17
2.1.4 <i>Intergovernmental Transfer</i> di Indonesia.....	22
2.1.5 Ukuran Desentralisasi Fiskal.....	24
2.1.6 Ketimpangan Regional.....	27
2.1.7 Ukuran Ketimpangan.....	29

2.1.8 Desentralisasi Fiskal dan Ketimpangan Regional.....	30
2.1.9 Peran Pemerintah.....	32
2.1.10 Hubungan Peran Pemerintah dan Ketimpangan Regional.....	35
2.1.11 Pendidikan.....	36
2.1.12 Hubungan Pendidikan dan Ketimpangan Regional.....	39
2.1.13 Kesehatan.....	40
2.1.14 Hubungan Kesehatan dan Ketimpangan Regional.....	40
2.2 Penelitian Terdahulu	40
2.9 Kerangka Pemikiran Teoritis	50
BAB III METODE PENELITIAN.....	52
3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	52
3.1.1 Ketimpangan Regional (VW).....	52
3.1.2 Derajat Desentralisasi Fiskal (EFDI).....	53
3.1.3 Pengeluaran Rumah Tangga Riil per Kapita	54
3.1.4 Pendidikan	54
3.1.5 Kesehatan.....	55
3.1.6 Peran Pemerintah	55
3.2 Populasi dan Sampel	56
3.3 Jenis dan Sumber Data	56
3.4 Metode Pengumpulan Data	57
3.5 Metode Analisis	57
3.5.1 Analisis Derajat Desentralisasi Fiskal	57
3.5.2 Analisis Tingkat Ketimpangan Regional	58
3.5.3 Metode Analisis Data Panel	59
3.5.4 Uji Asumsi Klasik	60
3.5.6 AB-GMM	64
3.5.7 Model Empiris	68

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	70
4.1 Deskripsi Objek Penelitian.....	70
4.1.1 Deskripsi Desentralisasi Fiskal di Indonesia	70
4.2 Analisis Data	74
4.2.1 Hasil Analisis Derajat Desentralisasi Fiskal.....	74
4.2.2 Hasil Analisis Ketimpangan Regional.....	77
4.2.3 Hasil Estimasi Regresi Data Panel	78
4.2.4 Hasil Uji Asumsi Klasik	79
4.2.5 Hasil Estimasi Model AB-GMM.....	82
4.3 Interpretasi dan Pembahasan.....	84
BAB V PENUTUP.....	88
5.1 Kesimpulan	86
5.2 Implikasi Kebijakan	89
5.2 Keterbatasan Penelitian	90
5.2 Saran untuk Penelitian Selanjutnya.....	90
DAFTAR PUSTAKA	92
LAMPIRAN.....	96

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	43
Tabel 3.1	Definisi Operasional Variabel.....	56
Tabel 4.1	Perkembangan Jumlah Daerah Otonomi di Indonesia	70
Tabel 4.2	Pembagian DBH berdasar Kepemilikan Sumber Daya Daerah.....	73
Tabel 4.3	Hasil Estimasi Regresi Data Panel Statis FEM dan REM	80
Tabel 4.4	Hasil Uji Multikolinearitas.....	81
Tabel 4.5	Hasil Estimasi SYS-GMM (Variabel Dependen: VW)	83

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Indeks Williamson Indonesia 1988 – 2013	5
Gambar 1.2 Dana Perimbangan di Indonesia 2001 – 2013	6
Gambar 2.1 Efek Transfer Non-Kondisional	18
Gambar 2.2 Efek <i>Matching Transfer</i>	20
Gambar 2.3 Efek <i>Non-matching Conditional Transfer</i>	21
Gambar 2.4 Kurva “U-Terbalik” Kuznets	29
Gambar 2.5 Kurva Perkembangan Pengeluaran Pemerintah	33
Gambar 2.6 Kurva Pengeluaran Pemerintah Peacock dan Wiseman	35
Gambar 2.7 Biaya dan Manfaat Individual Pendidikan	37
Gambar 2.8 Biaya dan Manfaat Sosial Pendidikan.....	38
Gambar 2.9 Kerangka Pemikiran Teoritis	51
Gambar 4.1 Dana Perimbangan di Indonesia 2004 – 2013 (Triliun Rupiah) ...	71
Gambar 4.2 DAU, DBH, DAK di Indonesia 2004 – 2013 (Triliun Rupiah)	72
Gambar 4.3 PAD di Indonesia 2004 – 2013	73
Gambar 4.4 Perkembangan Tingkat Otonomi Fiskal Nasional 2004 – 2013 ...	75
Gambar 4.5 Perkembangan Tingkat Otonomi Fiskal (Provinsi Terpilih) 2004 – 2013	75
Gambar 4.6 Tingkat EFDI Provinsi Terpilih (1) 2004 – 2013	76
Gambar 4.7 Tingkat EFDI Provinsi Terpilih (2) 2004 – 2013	77
Gambar 4.8 Perkembangan Tingkat Ketimpangan Regional (VW) Provinsi Terpilih 2004 – 2013	78

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN A Hasil Analisis	96
LAMPIRAN A1 Hasil Analisis Derajat Desentralisasi Fiskal	96
LAMPIRAN A2 Hasil Analisis Ketimpangan Regional.....	98
LAMPIRAN B Hasil Estimasi Data Panel Statis dan Uji Asumsi Klasik	100
LAMPIRAN B1 Hasil Estimasi FEM.....	100
LAMPIRAN B2 Hasil Estimasi REM	101
LAMPIRAN B3 Hasil Deteksi Normalitas.....	101
LAMPIRAN B4 Hasil Deteksi Multikolinearitas	101
LAMPIRAN B5 Hasil Deteksi Heteroskedastisitas.....	102
LAMPIRAN B4 Hasil Deteksi Autokorelasi (<i>Serial Correlation</i>).....	102
LAMPIRAN C Hasil Estimasi Data Panel Dinamis SYS-GMM	103
LAMPIRAN C1 Hasil Estimasi <i>One-step System GMM</i>	103
LAMPIRAN C2 Hasil Estimasi <i>Two-step System GMM</i>	103

DAFTAR ISTILAH

- Conditional Transfer* : dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang ditentukan secara spesifik penggunaannya
- EFDI (Enhanced Fiscal Decentralization Index)* : indeks desentralisasi fiskal yang dikembangkan Vo (2008) yang mengakomodasi adanya *intergovernmental transfer* dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal.
- FFDI (Fundamental Fiscal Decentralization Index)* : indeks desentralisasi fiskal yang dikembangkan oleh Vo (2008) yang terdiri atas komponen otonomi fiskal dan kepentingan fiskal
- Fiscal Gap* : selisih antara kebutuhan fiskal daerah dan kapasitas
- Hold Harmless Clause* : kebijakan yang ditentukan pada tahun 2001 yang memberi syarat agar nilai dana transfer non-kondisional harus bertambah tiap tahunnya
- Horizontal imbalances* : ketimpangan antar pemerintah daerah
- Intergovernmental transfer* : dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagai sumber penerimaan daerah dalam melaksanakan pemerintahan.
- Kepentingan fiskal (*fiscal importance*) : menggambarkan besaran pengeluaran publik pemerintah daerah terhadap keseluruhan pengeluaran pemerintah
- Otonomi fiskal (*fiscal autonomy*) : menggambarkan hubungan antara pendapatan asli daerah (PAD) terhadap total pengeluaran daerah
- Spillovers* : eksternalitas dari aktivitas ekonomi yang berdampak pada pihak yang tidak terlibat di dalamnya.
- Unconditional Transfer* : dana transfer dari pemerintah pusat kepada

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebelum memasuki era reformasi, Indonesia melaksanakan sistem pemerintahan yang sentralistik. Sistem pemerintahan sentralistik memberikan otoritas penuh bagi pemerintah pusat dalam melaksanakan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi dalam pemerintahan. Sistem pemerintahan sentralistik cenderung memberi ruang yang sangat kecil bagi pemerintah daerah, sehingga menyebabkan terjadinya beberapa permasalahan.

Salah satu permasalahan yang dihadapi dalam sistem pemerintahan sentralistik adalah ketimpangan regional. Booth dan Sundrum (1981) membuktikan bahwa pendapatan di wilayah perkotaan lebih tinggi 42% dibandingkan rata-rata pendapatan di wilayah pedesaan. Angka tersebut bahkan meningkat pesat hingga mencapai 84% pada tahun 1976 dan mencapai 92% pada tahun 1993 (Booth, 1998).

Masalah lainnya yang timbul atas pelaksanaan sistem pemerintahan sentralistik adalah adanya ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Sulston (2003) menyatakan hal tersebut dipicu oleh peran pemerintah pusat yang sangat dominan dalam pemerintahan, sedangkan pemerintah daerah tidak berperan besar dalam pemerintahan. Oleh karena itu, pemerintah daerah cenderung hanya menjadi pelaksana administratif dalam pemerintahan di daerah.

Selain itu, permasalahan lainnya adalah tidak sesuainya kebijakan yang ditentukan dalam sistem sentralistik dengan preferensi daerah atau prioritas pembangunan daerah. Hal tersebut disebabkan kebijakan-kebijakan dalam sistem sentralistik bersifat *one fits all*, yaitu kebijakan yang ditentukan pemerintah pusat yang kemudian diseragamkan di tingkat pemerintah daerah. Mengingat Indonesia yang sangat luas dengan daerah-daerah yang heterogen, kebijakan yang bersifat *one fits all* ini tentu belum tentu sesuai untuk dilaksanakan di seluruh daerah.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut dan terjadinya pergolakan ekonomi tahun 1997, timbul tuntutan-tuntutan dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Resosudarmo, et al (2011) menyatakan terjadinya pergolakan ekonomi tahun 1997 memicu munculnya tuntutan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atas bagi hasil sumber daya alam yang adil. Selain itu, pemerintah daerah menuntut agar terdapat perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta otoritas yang lebih besar untuk mengelola sumber daya yang dimiliki oleh daerah.

Oleh karena permasalahan-permasalahan yang timbul, tahun 2001 Indonesia resmi melaksanakan sistem pemerintahan desentralistik berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (yang kemudian diamandemen menjadi Undang-undang No. 32 Tahun 2004) yang mengatur pendelegasian wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat di daerahnya.

Secara umum, undang-undang tersebut memberi kewenangan bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan desentralisasi administrasi, desentralisasi politik, dan desentralisasi keuangan (fiskal). Sidik (2002) menyatakan bahwa dari aspek administrasi, desentralisasi dilaksanakan agar tercipta efisiensi dalam pelayanan kepada masyarakat daerah. Aspek politik bertujuan agar tercipta pembagian wewenang yang adil antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sedangkan desentralisasi fiskal di Indonesia secara tidak langsung bertujuan untuk meningkatkan kemampuan fiskal daerah dan mengurangi ketimpangan antar pemerintah daerah (*horizontal imbalance*) dan ketimpangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (*vertical imbalance*).

Atas konsekuensi pelaksanaan sistem pemerintahan yang desentralistik, Indonesia melaksanakan sistem desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal di Indonesia kemudian diatur berdasarkan Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan yang diperbarui menjadi Undang-undang No. 33 Tahun 2004. Berdasarkan undang-undang tersebut, pemerintah pusat memiliki kewajiban untuk memberi dana perimbangan kepada pemerintah daerah sesuai dengan prinsip "*money follows function*" (Bahl, 1999). Waluyo (2007) menjelaskan lebih lanjut bahwa prinsip ini secara umum berarti fungsi pokok pelayanan publik atau pelaksanaan pemerintahan ada di bawah kekuasaan pemerintah daerah dengan dukungan pembiayaan pemerintah pusat melalui sumber penerimaan daerah. Sumber penerimaan tersebut adalah dana perimbangan.

Dana perimbangan terdiri atas tiga komponen yaitu Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). DBH terdiri atas dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil sumber daya alam yang merupakan instrumen untuk mengurangi ketimpangan vertikal. DAU merupakan dana yang dialokasikan dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) sebagai instrumen pemerataan dalam pengelolaan keuangan daerah untuk mengurangi ketimpangan antar daerah atau ketimpangan horizontal. APBN juga menganggarkan DAK yang digunakan sebagai instrumen untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan spesifik daerah.

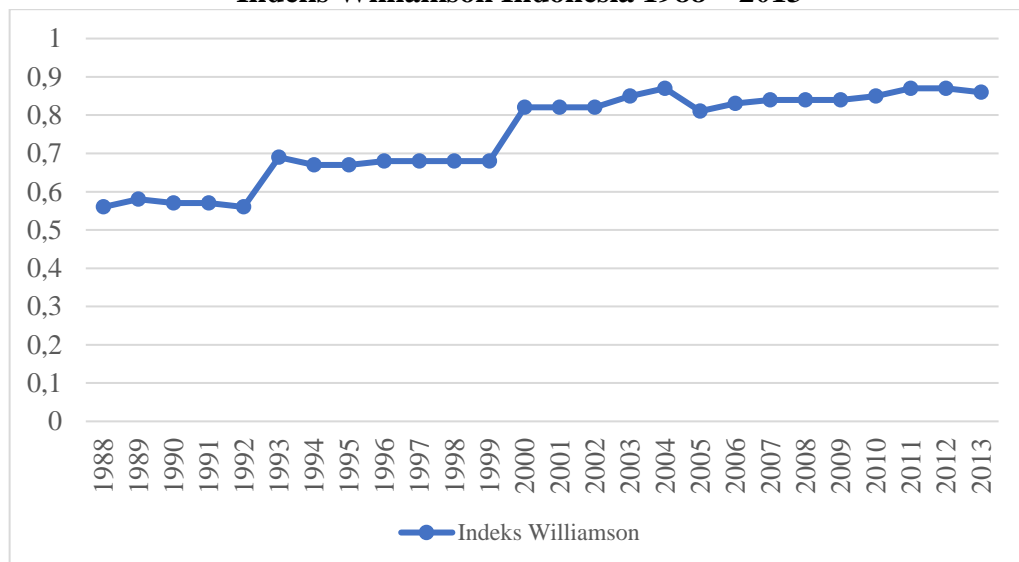
Pendelegasian wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah melalui instrumen-instrumen desentralisasi fiskal diharapkan dapat memberi dampak positif bagi pembangunan ekonomi. Oates (1977) menyatakan bahwa pelaksanaan desentralisasi sesungguhnya dapat meningkatkan efisiensi pelayanan publik melalui pemerintah daerah yang dipilih oleh masyarakat yang melaksanakan pilihan penganggaran melalui pajak daerah yang dikelola langsung oleh daerah. Secara tidak langsung, efisiensi tersebut memicu pemilihan kebijakan serta pilihan penganggaran yang sesuai dengan prioritas pembangunan di daerah. Oleh karena itu, desentralisasi fiskal diharapkan dapat meningkatkan pembangunan daerah.

Pembangunan daerah tidak semata-mata diukur hanya berdasarkan pertumbuhan ekonomi, melainkan dapat diukur dari sisi pemerataan kemakmuran atau persoalan ketimpangan yang terjadi di daerah tersebut. Sesuai dengan tujuan pelaksanaan desentralisasi fiskal dalam mengurangi tingkat ketimpangan, maka

penelitian tentang pengaruh pelaksanaan desentralisasi fiskal terhadap tingkat ketimpangan regional menjadi sangat menarik.

Pertanyaan yang timbul adalah apakah pelaksanaan desentralisasi fiskal mengurangi ketimpangan yang terjadi di Indonesia? Apakah dana perimbangan sebagai instrumen desentralisasi fiskal mampu mempengaruhi ketimpangan yang terjadi di Indonesia?

Gambar 1.1
Indeks Williamson Indonesia 1988 – 2013

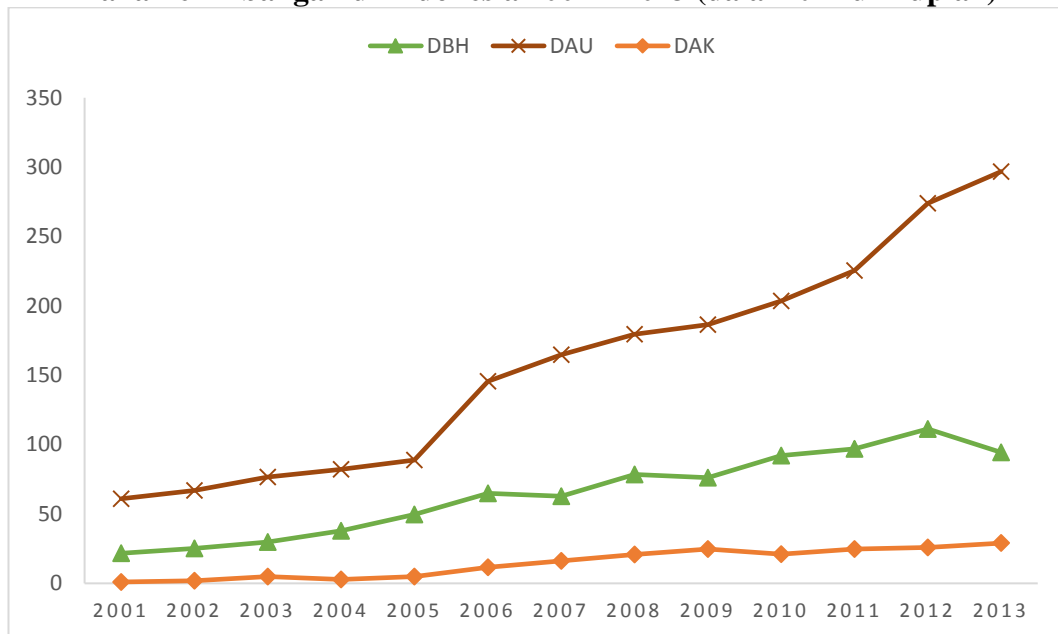


Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, observasi singkat dapat dilakukan pada Gambar 1.1 dan Gambar 1.2. Gambar 1.1 menggambarkan kecenderungan ketimpangan pendapatan di Indonesia yang diukur melalui Indeks Williamson. Indeks Williamson tersebut diukur dengan data PDRB (non-migas) sebagai *proxy* data pendapatan. Gambar tersebut membuktikan bahwa ketimpangan pendapatan di Indonesia justru meningkat pada awal pelaksanaan desentralisasi fiskal. Selain

itu, selama 13 tahun pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia, tidak terdapat perubahan yang signifikan atas ketimpangan pendapatan.

Gambar 1.2
Dana Perimbangan di Indonesia 2001 – 2013 (dalam triliun rupiah)



Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, diolah.

Gambar 1.2 menggambarkan tiga komponen dana perimbangan yaitu DBH, DAU, dan DAK. Gambar tersebut menunjukkan bahwa dana perimbangan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Khususnya, komponen DAU sebagai instrumen utama yang dialokasikan untuk mengatasi permasalahan ketimpangan horizontal, mengalami pertumbuhan yang sangat pesat setiap tahunnya. Jika dilakukan observasi singkat terhadap dua gambar di atas, terdapat indikasi bahwa peningkatan dana perimbangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah belum tentu mengurangi ketimpangan antar daerah. Sederhananya, terdapat indikasi pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia belum mencapai tujuannya untuk menekan ketimpangan di Indonesia.

Berdasarkan observasi singkat tersebut, terdapat indikasi bahwa pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia tidak mengurangi ketimpangan regional yang terjadi. Sebaliknya, ketimpangan regional justru cenderung meningkat sejak dimulainya desentralisasi fiskal di Indonesia. Dilatarbelakangi hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pengaruh pelaksanaan desentralisasi fiskal terhadap ketimpangan regional di Indonesia.

1.2. Rumusan Masalah

Pelaksanaan desentralisasi fiskal memiliki tujuan utama untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan pemerintahan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengurangi ketimpangan regional. Oleh karena itu, penelitian ini akan menginvestigasi apakah pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia mampu mengurangi ketimpangan regional di Indonesia. Secara khusus, masalah penelitian dalam studi ini diformulasikan dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran derajat desentralisasi fiskal di Indonesia?
2. Bagaimana gambaran ketimpangan regional di Indonesia dalam era desentralisasi fiskal?
3. Bagaimana pengaruh pelaksanaan desentralisasi fiskal terhadap ketimpangan regional di Indonesia?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi pengaruh pelaksanaan desentralisasi fiskal terhadap ketimpangan regional di Indonesia. Secara khusus tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis derajat desentralisasi fiskal di Indonesia.
2. Menganalisis ketimpangan regional di Indonesia dalam era desentralisasi fiskal.
3. Menganalisis pengaruh pelaksanaan desentralisasi fiskal terhadap ketimpangan regional di Indonesia.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini dari segi akademis adalah untuk memperkaya kajian ekonomi publik dan ekonomi pembangunan. Selain itu, penelitian ini dapat memberi gambaran tentang pelaksanaan dan pengaruh yang ditimbulkan atas pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia, khususnya pengaruhnya terhadap ketimpangan regional di Indonesia. Hal ini dapat dijadikan bahan evaluasi pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia.

1.4. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan penelitian ini terbagi menjadi lima bab yang disusun sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: TELAAH PUSTAKA

Bab ini berisi landasan teori yaitu teori klasik dan teori generasi kedua desentralisasi fiskal, *intergovernmental transfer* sebagai komponen penting dalam desentralisasi fiskal, ketimpangan regional dan ukuran ketimpangan regional, serta studi empiris terkait. Bab ini juga memuat kerangka pemikiran.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini berisi deskripsi penelitian secara operasional dimulai dari penjelasan tentang variabel penelitian dan definisi operasional, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data, dan model empiris yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi deskripsi objek penelitian, hasil analisis melalui metode yang digunakan dan dilanjutkan dengan pembahasan.

BAB V: PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan, implikasi kebijakan, keterbatasan penelitian, dan saran.